

BAB V

KESIMPULAN

Suku Baduy Dalam adalah masyarakat adat yang bertempat di kawasan pegunungan Kendeng. Suku Baduy Dalam terbagi atas tiga bagian, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Suku Baduy Dalam yang memiliki pola kehidupan yang kental akan *pikukuh* serta jauh dari kehidupan masyarakat yang modernisasi menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan mereka. Pada tahun 2020, pencanangan Suku Baduy Dalam sebagai pariwisata budaya berganti nama menjadi saba budaya. Pergantian nama ini sebagai bentuk resolusi potensial dari konflik posisi penempatan Suku Baduy Dalam sebagai obyek pariwisata. Masyarakat Cibeo yang terbuka akan hal ini melihat bahwa posisi penempatan mereka sebagai obyek tontonan hanyalah hoax dari orang-orang yang syirik akan kegiatan wisata budaya tersebut. Dari dua wilayah Suku Baduy Dalam hanya Suku Baduy Dalam kawasan Cibeo yang terbuka akan kegiatan pariwisata budaya ini. Menurut mereka bahwa kawasan Cibeo sudah terbuka sejak jaman pemerintahan Soeharto. Mereka melihat nenek moyang mereka juga terbuka akan orang luar yang ingin bersilaturahmi.

Dampak posisi penempatan mereka juga diatur oleh undang-undang pemerintah desa. Termasuk pergantian nama wisata menjadi saba budaya. Suku Baduy Dalam yang bertindak sebagai tuan rumah dalam pariwisata budaya ini merasa bahwa dari dahulu hingga sekarang mereka tidak mengalami perubahan semenjak ada kegiatan *open trip* yang dilakukan WISUBA sejak tahun 2015. Hal yang mereka rasakan adalah lebih mudah menjual sesuatu yang dibutuhkan wisatawan. Selain itu, mereka juga dihadapkan situasi interaksi selama kegiatan wisata budaya ini berlangsung. Berhubungan dengan itu, memerlukan strategi batas etnik sebagai bentuk mempertahankan identitas etniknya ditengah gempuran interaksi yang dibawa wisatawan.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan rumusan masalah penelitian, bab ini akan menyajikan beberapa poin kesimpulan.

Pertama, pencanangan wisata budaya dilatarbelakangi oleh daya tarik wisatawan yang penasaran akan keindahan alam, pola kehidupan Suku Baduy Dalam serta sensasi pengalaman kehidupan tradisional Suku Baduy Dalam. Keterbukaan Suku Baduy Dalam sejak nenek moyang mereka membawa kegiatan *open trip* yang dikelola WISUBA berlangsung terus-menerus hingga saat ini. Selain itu, hal ini dilatarbelakangi oleh keputusan penentuan pencanangan yang memiliki kekuasaan tertinggi dimiliki oleh *pu'un* dan *jaro* sebagai struktur masyarakat tertinggi di kawasan Suku Baduy Dalam. Sehubungan dengan itu, pencanangan ini memang tidak memiliki izin pemerintah pusat, sehubungan dengan itu diizinkan oleh *jaro pamerantah*, yaitu kepala Desa Kanekes.

WISUBA menggunakan pendekatan secara lisan perihal perizinan ke *jaro* setempat. Bagi, masyarakat Suku Baduy Dalam di kawasan Cibeo kegiatan wisata memang tidak diperbolehkan tapi silaturahmi masyarakat luar kepada mereka diperbolehkan dengan ketentuan keputusan adat. Adapun, undang-undang peraturan yang mengatur mengenai saba budaya ini, yaitu Peraturan Desa nomor 01 Tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy). Pencanangan wisata budaya ini memberikan penjelasan keberlangsungan saba budaya sendiri. Meski pergantian nama ini berlangsung selama dua tahun namun, aktivitas yang dilakukan tidak ada perubahan.

Kedua, dalam kegiatan wisata Suku Baduy Dalam memiliki penempatan sebagai tuan rumah yang menjamu tamunya. Posisi ini menempatkan wisata Suku Baduy Dalam memiliki peran keterlibatan atas kegiatan silaturahmi, seperti penutupan wilayah, pembukaan wilayah, sebagai pemandu jalan selama kegiatan berlangsung mereka juga memberikan jasa layanan porter hingga penjualan oleh-oleh. Posisi penempatan Suku Baduy Dalam sebagai tuan rumah menjadikan Suku Baduy Dalam memiliki keterlibatan peran. Dilihat dari konteks hubungan posisi penempatan mereka antara Suku Baduy Dalam, wisatawan, WISUBA sebagai

pengelola atau perusahaan *open trip* serta pemerintah. Pemerintah mengikuti ketentuan adat yang ada, begitupun dengan pengelola wisata. Namun, posisi ini menempatkan hubungan tuan rumah dan tamu. Tuan rumah yang memiliki kebudayaan yang masih kental akan *pikukuh* menjadi daya tarik untuk wisatawan yang mengunjunginya.

Menurut Nunez (dalam Smith, 1989) wisatawan cenderung berpikir bahwa tuan rumah memiliki sesuatu hal yang lebih rendah dari mereka sehingga memicu rantai perubahan dalam komunitas tuan rumah. Hubungan ini juga diwarnai dengan ikatan yang afektif adapun resolusi potensial yang dimiliki WISUBA dengan memberi salam pertanda penghormatan untuk tuan rumah. Sehubungan dengan itu, keterlibatan Suku Baduy Dalam dengan wisatawan yang cukup terikat dengan rangkaian perjalanan membuat kedekatan antara keduanya.

Ketiga, Dampak penempatan tuan rumah ini terlihat adanya komodifikasi budaya Suku Baduy Dalam yang biasanya menggunakan tenun untuk kebutuhan sandang mereka kini beralih menjadi penjualan yang bersifat nilai ekonomi. Menurut Yang dan Wall (2009) komodifikasi budaya etnis bagaimana produk wisata dimanipulasi agar sesuai kepentingan bisnis dan politik. Hal ini terlihat bagaimana pariwisata budaya Suku Baduy terlihat pada ukiran gelas oleh-oleh dan kain tenun (lihat gambar 20) yang menjadi ciri khas mereka ukiran dibuat seolah-olah produk tersebut buah tangan dari Suku Baduy Dalam perjalanannya mereka. Komodifikasi ini dapat mendorong Suku Baduy Dalam mengubah perilaku mereka mengikuti tuntutan pasar, dampak ini mengakibatkan hilangnya identitas mereka dan aktivitas tradisional jika terjadi secara terus menerus. Menurut Ayah Hendrik, bahwa tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka, Suku Baduy Dalam masih tetap berladang. Hanya saja kedatangan wisatawan mereka dapat menjual sesuatu yang wisatawan inginkan. Dengan demikian, kegiatan pariwisata budaya memberikan dampak atas pemasukan ekonomi mereka, tanpa disadari terjadi komodifikasi budaya yang terjadi bagaimana mereka mengemas budaya mereka sesuai dengan keinginan wisatawan. Menurut Yang dan Wall (2009)

memenuhi keinginan wisatawan akan eksotisme budaya, bisnis pariwisata secara eksplisit mengemas, memasarkan, dan mempromosikan elemen budaya etnis yang dianggap primitif, pramodern, eksotis, dan menyenangkan. Komodifikasi ini terjadi tanpa persetujuan dan tanpa secara sadar sehingga mereka menganggap bahwa tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dampak penempatan posisi tuan rumah ini menjadi catatan penting rusaknya ekosistem alam akibat sampah-sampah yang dibawa wisatawan.

Keempat, yaitu strategi batas etnik yang diterapkan pada wisatawan dan pada diri mereka sendiri sebagai anggota suatu kelompok etnik. Atas persetujuan anggota etnik adanya kegiatan wisata budaya ini memberikan batas yang berbeda atas anggota kelompoknya dan bukan anggota kelompoknya. Batas yang berbeda ini didasarkan pada keuntungan mereka dalam melakukan kegiatan wisata. Adapun batas yang diterapkan untuk anggota kelompok etnik Suku Baduy Dalam, yaitu (1) tidak boleh menggunakan alat-alat modern, (2) tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit dengan alat, (3) tidak boleh berzinah, poligami dan mengambil hak milik orang lain, (4) tidak boleh merokok, (5) tidak boleh menggunakan alas kaki, (6) tidak boleh menggunakan transportasi modern, (7) tidak boleh mengenyam pendidikan formal, (8) tidak menggunakan pakaian selain warna putih dan hitam, (9) tidak boleh menikah dengan masyarakat dari luar Baduy. Batas yang diterapkan untuk wisatawan, yaitu (1) tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia selama di kawasan Suku Baduy Dalam, (2) tidak boleh mendokumentasikan wilayah/kawasan Suku Baduy Dalam, (3) tidak boleh menginjak kawasan sakral, seperti hutan larangan, dan halaman rumah *pu'un*, (4) tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau berisik yang membuat kegaduhan, (5) tidak boleh mencabut/merusak tanaman di kawasan Suku Baduy Dalam dan Luar, (6) pada turis asing tidak diperkenankan masuk kawasan Suku Baduy Dalam hal ini berdasarkan aturan adat yang berlaku, (7) Sampah plastik yang dibawa wisatawan harus dibawa kembali pada saat pulang.

Strategi batas ini adalah cara mereka mempertahankan identitas mereka ditengah entitas kesukuan mereka (lihat gambar 23). Dengan demikian, strategi batas ini harus ditegaskan dengan orang-orang di luar Suku Baduy Dalam, dibutuhkan peran pemerintah dan pengelola wisata untuk mematuhi aturan batas yang menjaga eksistensi Suku Baduy Dalam sendiri. Dalam hal ini jelas bahwa Suku Baduy Dalam memiliki latar belakang pencaharian wisata berganti menjadi saba budaya karena nilai-nilai adat mereka sekaligus keindahan alam yang ada. Namun, posisi penempatan Suku Baduy Dalam sebagai tuan rumah memiliki dampak pada nilai-nilai budaya mereka yang berinteraksi dengan anggota etnik atau kelompok sosial lainnya.

Namun, ternyata masih ada anggota Suku Baduy Dalam yang melanggar batas ini. Sehubungan dengan itu, kegiatan saba budaya menjadi berorientasi ekonomi tidak disadari secara langsung oleh Suku Baduy Dalam sendiri ini akan menjadi kerusakan budaya karena luntarnya nilai-nilai keaslian yang ada. Di samping itu, adanya kerusakan ekologi atau lingkungan mereka akibat sampah yang dibawa wisatawan. Untuk itu diperlukan strategi batas etnik atau batas sosial sebagai perlindungan dari mereka saat berinteraksi dengan wisatawan. Namun, masih ada saja anggota mereka yang melanggar hal tersebut karena mereka mempercayai hukum alam yang bersifat *kualat*. Hukum alam ini adalah kepercayaan mereka sendiri walau pada dasarnya, mereka juga memiliki sistem peradilan adat. Namun, jarang digunakan karena keterikatan mereka yang bersumber pada kehidupan yang harmonis sebagai identitas sistem kepercayaan mereka. Hingga saat ini, kegiatan saba budaya masih berlangsung dengan keputusan adat sebagai hukum tertinggi dan batas etnik sebagai bentuk tindakan mereka untuk menjaga identitas Suku Baduy Dalam dari nilai-nilai yang dibawa wisatawan.